J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6,Oktober 2024

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Putri Dwi Maulidya[1], Ika Nur Azmi[2]
[1]Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Pontianak
[2]Program Studi Akuntansi, Universitas Tanjungpura, Pontianak
E-mail: b1033211029@student.untan.ac.id[1], ikanurazmi@ekonomi.untan.ac.id[2]

Article History:
Received: 25 September 2024
Revised: 10 Oktober 2024
Accepted: 14 Oktober 2024

Keywords: *budget targets; accounting control; reporting systems; performance accountability*

Abstract: *This research aims to analyze the effect of budget target clarity, accounting control, and reporting system on the performance accountability of government agencies/institutions in the Work Units within the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. Performance accountability of government agencies refers to the responsibility for actions and programs implemented by the government. The research method is quantitative, using questionnaires sent to respondents. The research sample included 50 respondents from 14 work units at the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan, selected using the purposive sampling method. Data was analyzed using multivariate regression analysis through SPSS v25 software. The study's results stated that budget target clarity and accounting control had no significant impact on performance accountability in the work units of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. However, the reporting system had a substantial effect on the performance accountability of government agencies in work units within the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.*

PENDAHULUAN

Tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik dalam hal akuntabilitas kinerja semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan harapan masyarakat mengenai transparansi dan efektivitas pemerintah. Akibatnya, akuntansi pemerintahan harus memiliki akuntabilitas publik agar pemerintahan yang baik dapat terjadi. Dalam Inpres 7/1999 menetapkan bahwa unit pemerintah harus bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tusinya, serta wewenang yang diberikan. Akuntabilitas telah menjadi prinsip umum dalam pengelolaan pemerintahan. Sesuai Perpres No. 29 Th. 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menyampaikan hasil atau ketidakberhasilan dalam menjalankan program atau kegiatan yang ditugaskan kepada pemilik kepentingan, dengan tujuan meraih visi dan misi organisasi secara terukur. Satu diantara prinsip utama mengenai konsep good governance (pemerintahan yang baik) yakni akuntabilitas,

didasarkan pada gagasan tidak ada tindakan atau perbuatan pemerintahyang tidak dapat dipertanggungjawabkan; segala tindakan atau aktivitas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Jatmiko (2020), akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam menyampaikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan kepada masyarakat yang memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Syah (2021), akuntabilitas dibutuhkan untuk memastikan tidak ada pemborosan yang dapat mempengaruhi sumber daya publik. Selain itu, pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan pemerintah berfokus pada apakah dana digunakan sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku (Melia & Sari, 2019). Ironisnya, berdasarkan pada hasil pengawasan dan evaluasi Menpan-RB, ada beberapa bukti mengindikasikan akuntabilitas masih lemah dan SAKIP belum diterapkan secara efektif dan konsisten. Salah satu contohnya kurangnya komitmen untuk mengutamakan akuntabilitas dari sisi kinerja, menyebabkan kurangnya perhatian yang diberikan kepada akuntabilitas di level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (www.menpan.go.id, 2024).



Gambar 1. Paparan SAKIP LKJIP Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

Mengacu pada hasil evaluasi SAKIP, Kemenpan-RB memberikan Kementerian Hukum dan HAM nilai "BB" selama 3 tahun terakhir. Nilai ini belum memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Target untuk akuntabilitas kinerja masih belum tercapai, tetapi Kementerian Hukum dan HAM telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkannya. Menurut sumber data kajian sebelumnya, tidak ada penelitian mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian Hukum dan HAM dan satuan kerjanya (Berdasarkan pencarian penulis di Website Sinta.kemdikbud.go.id dan Mendeley.com). Dengan demikian, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada UPT di lingkup Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kalimantan Barat.

Herawaty (2014) mengidentifikasi lima faktor—sistem pelaporan, penggunaan anggaran basis kinerja, pengendalian akuntansi, dan motivasi, serta kejelasan tujuan anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Riset ini berupaya mengkaji secara empiris terkait pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Satu diantara elemen yang mempunyai pengaruh pada akuntabilitas kinerja ialah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan kemudahan bagi lembaga pemerintah baik pusat dan daerah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun keberhasilannya dalam upaya pencapaian sasaran yang telah dicanangkan

(Precilia & Mimba, 2020). Anggaran yang jelas berperan penting dalam akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah karena memfasilitasi transparansi dan pengawasan. Ketika anggaran disusun dengan rinci memungkinkan publik dan pengawas untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana anggaran digunakan. Ini juga menyediakan indikator dan target yang membantu lembaga dalam mengukur pencapaian tujuan organisasi (Suryani & Pujiono, 2020). Dengan anggaran yang terstruktur, pengeluaran dapat dikendalikan dan diawasi dengan lebih baik, mempermudah instansi pemerintah untuk menjelaskan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan. Selain itu, anggaran yang jelas mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Dengan demikian, anggaran yang terperinci memperkuat akuntabilitas dengan memastikan penggunaan dana yang optimal dan efektif. Hasil riset sebelumnya oleh Kharisma, Rahayu, Yudi (2021) menyimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, studi yang dilakukan Priatna dan Nuraisyah (2018), juga menyimpulkan hal yang selaras pada pemerintah Desa Kecamatan Cisewu. Akan lebih mudah untuk memperhitungkan keberhasilan maupun kegagalan organisasi jika tujuan anggarannya jelas.

Komponen lain yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas adalah pengendalian akuntansi. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menilai seluruh operasi dan tanggung jawabnya melalui pengendalian akuntansi. Ini dibutuhkan guna mengevaluasi seberapa hemat biaya, efektif, dan efisien kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Menurut studi sebelumnya oleh Harianto D., Kennedy, Zarefar A. (2021), akuntabilitas kinerja pada SKPD Rokan Hilir dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengendalian akuntansi. Namun riset Yulianti, Astri Furqani (2023) mengungkapkan hasil sebaliknya.

Aspek lain yang berdampak terhadap akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan sistem yang mengumpulkan data tentang aktivitas, hasil, dan dampak dari suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitasnya dan menciptakan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam kapasitasnya untuk mengelola dana publik, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyajikan data keuangan secara akurat, relevan, konsisten, dan andal. Meskipun studi oleh Ariyandani, Chalid, Umar (2020) & Azizah (2020) menyatakan sistem pelaporan meningkatkan akuntabilitas kinerja, riset yang dilakukan Anastasia D. R. (2018) memiliki hasil yang berbeda yaitu akuntabilitas kinerja tidak dipengaruhi oleh sistem pelaporan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

LANDASAN TEORI

A. Teori Keagenan telah digunakan baik di sektor publik maupun swasta. Ada tujuan berbeda di balik penerapan teori agensi, terutama dalam hal penganggaran antara sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pelaporan kinerja. Menurut teori keagenan, akuntabilitas adalah tugas agen pemerintah untuk hadir, akuntabel, melaporkan, dan transparan mengenai seluruh operasi dan tindakannya kepada prinsipal, atau masyarakat umum.

B. Teori Koentigensi menyatakan konsep sistem kontrol harus kontijen (bersyarat) terhadap konstektual kontrol organisasi di mana sistem akan berjalan, seperti yang dinyatakan oleh Sisaye (1998). Konsep kesesuaian teori kontingensi menggambarkan betapa eratnya keterkaitan elemen kontekstual—seperti pelaporan, pengendalian akuntansi, dan penganggaran—dengan sistem akuntansi manajemen. Sistem pemerintahan akan lebih akuntabel jika elemen kontekstual seperti akuntabilitas kinerja dan sistem akuntansi manajemen saling berkolaborasi.

1. **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran berarti target yang ingin dicapai dengan penggunaan anggaran ditetapkan secara spesifik dan terukur. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, indikator kinerja untuk menilai pencapaian, serta alokasi sumber daya yang tepat. Semakin jelas sasaran anggaran suatu instansi, semakin mudah bagi instansi tersebut untuk merancang strategi guna mencapai tujuannya (Mulya & Fauzihardani, 2022). Lebih lanjut, dengan sasaran yang jelas, lembaga atau organisasi dapat memprioritaskan pengeluaran, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, serta memudahkan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran.

2. **Pengendalian Akuntansi**
   Pengendalian akuntansi adalah proses yang memastikan aktivitas keuangan dan laporan keuangan dilakukan dengan akurat dan sesuai kebijakan. Ini melibatkan penerapan kebijakan akuntansi, pemantauan pelaksanaan, pengawasan internal untuk mencegah kesalahan atau penyelewengan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Tujuannya adalah menjaga keakuratan laporan keuangan, mengelola risiko, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Pengendalian akuntansi juga berfungsi untuk menilai ketidaktepatan dan ketidakefektifan dalam menghasilkan informasi untuk laporan keuangan (Suryani, S., Febrina, R., & Salmi, S., 2022)
3. **Sistem Pelaporan**
   Sistem pelaporan digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi keuangan dan operasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk legislatif, dan pengawas, serta publik. Sistem ini bertujuan guna memastikan bahwa laporan yang dihasilkan akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi serta standar akuntansi pemerintah. Peraturan pemerintah tentang SAKIP menetapkan semua entitas tingkat pusat & daerah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Tujuan utama dari pelaporan guna memberikan informasi yang mendukung pengambilan kebijakan, mewujudkan akuntabilitas atas sumber daya yang diberdayakan dan penggunaannya, serta memberikan data yang komprehensif untuk menilai kinerja dan pencapaian tujuan secara efisien (Muahamad Karyadi, 2023). Ini membantu dalam menunjukkan bagaimana anggaran publik digunakan, mendukung akuntabilitas, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian program pemerintah.
4. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
   Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban dan tanggung jawab lembaga pemerintah dalam menyajikan informasi tentang kinerja kepada pihak yang berhak dan wewenang memintanya. Beralaskan pemahaman di atas, setiap organisasi, badan, atau lembaga pemerintah pusat dan daerah dituntut memahami seberapa besar tanggung jawabnya meliputi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugasnya. Sistem Akuntabilitas atau disebut dengan SAKIP dibentuk dan diberlakukan sebagai akibat dari menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang transparan serta beretika. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menjamin pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan bebas dari kegiatan KKN. LAKIP merupakan laporan yang disusun secara berkala setiap tahunnya. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pembuatan LAKIP harus diatur sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas

tinggi, dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Perumusan Hipotesis Penelitian

Menurut Yulianto, Muthaher (2019), adanya sasaran anggaran yang jelas akan lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidakberhasilan atas pelaksanaan tugas organisasi guna meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi akan lebih mudah menerima akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai tujuan dan sasarannya ketika target anggarannya jelas. Studi yang berfokus pada sektor publik, seperti Viola, Andriana, dan Wardhaningrum (2023), menghasilkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Perihal ini selaras dengan studi oleh Azizah (2020) yang menyimpulkan akuntabilitas kinerja sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. Namun terdapat inkonsistensi temuan penelitian. Menurut Arfianty, Fatimah (2023), kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Atas dasar justifikasi diatas, hipotesis yang diperoleh adalah:

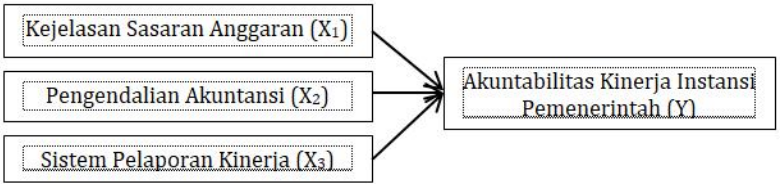
H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian akuntansi sebagai serangkaian kebijakan serta metode yang dirancang guna menjamin keandalan, keakuratan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan suatu entitas atau organisasi. Hal ini bertujuan guna melindungi aset, meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan, serta menjamin bahwa informasi keuangan dapat diandalkan dan penting dalam proses pengambilan keputusan. Riset sebelumnya oleh Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa (2019) menemukan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yulianti, Astri Furqani (2023) tidak menemukan hubungan antara akuntabilitas kinerja institusi pemerintah dengan pengendalian akuntansi pada studi empiris di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan alasan di atas, berikut adalah hipotesis penelitian :

H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sitem pelaporan adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan melaporkan pencapaian tujuan atau kinerja suatu entitas/organisasi. Pelaporan terbagi menjadi dua yaitu laporan keuangan dan laporan kinerja. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang keadaan keuangan organisasi publik serta transaksi yang telah mereka selesaikan selama jangka waktu tertentu. Namun laporan kinerja merupakan cerminan tugas untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh sumber daya dan aktivitas yang dimanfaatkan dalam proses pencapaian akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan digunakan untuk mengawasi dan memantau kinerja manajemen selama anggaran yang disepakati sebelumnya dilaksanakan. Argumen tersebut seiring dengan riset Harianto D., Kennedy, Zarefar A. (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas kinerja sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan sistem pelaporan yang efektif bisa memperkuat akuntabilitas kinerja. Namun hasil temuan tersebut berlainan dengan Muahamad Karyadi (2023) yang mengungkapkan sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada DPPKAD Kab. Lombok Timur. Berlandaskan penjelasan di atas, diperoleh hipotesis:

H3: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Gambar 2. Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang menguji karakteristik variabel permasalahan melalui penggunaan teknik kausal-komparatif. Pengaruh dua faktor atau lebih serta hubungan sebab akibat dianalisis dengan menggunakan teknik kausal komparatif. Penelitian difokuskan pada Unit Kerja dilingkup Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat sebanyak 14 Satuan Kerja. Purposive sampling digunakan untuk melakukan pengambilan sampel guna memperoleh sampel representatif yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Penulis memilih pejabat maupun pegawai yang berperan di Bagian Keuangan dan Bagian Tata Usaha sebagai responden dengan jumlah 50 orang.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikirim langsung ke responden melalui Google Formulir, untuk memudahkan penulis dalam memproses tanggapan. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Teknik ini berguna untuk mengevaluasi relasi antara beberapa variabel independen (X1, X2, X3,..dst) dengan satu variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen, seperti Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan, terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Persamaan yang diaplikasikan yaitu:

$$AKIP = \alpha + \beta 1\ KSA + \beta 2\ PA + \beta 3\ SP + \mathcal{E} \quad (1)$$

Keterangan :
AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, α : konstanta , β_1,2,3 : koefisien regresi dari variabel independen, KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran, PA : Pengendalian Akuntansi, SP : Sistem Pelaporan, **Ɛ** : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas diperlukan guna menentukan apakah variabel penelitian berdistribusi normal. Ini dapat ditentukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 1.Uji Normalitas

Sig	Taraf Sig	Ket.
.068	.05	Distribusi Normal

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel 1 untuk uji Normalitas memperoleh angka sig 0,068 > 0,05. Ini mengartikan asumsi normalitas terpenuhi dengan model regresi, karena nilai signifikansi melebihi 0,05.

Uji Validitas untuk menilai keabsahan kuesioner. Jika pernyataan atau pertanyaan pada

suatu kuesioner dapat mengungkap pokok bahasan yang diukur, maka hal tersebut dianggap sah (Ghozali, 2018).

Tabel 2.Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	</>	R tabel	Validitas
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	1.1	.624	>	.279	√
	1.2	.661	>		√
	1.3	.652	>		√
	1.4	.682	>		√
	1.5	.566	>		√
	1.6	.642	>		√
	1.7	.663	>		√
	1.8	.498	>		√
	1.9	.720	>		√
	1.10	.616	>		√
	1.11	.628	>		√
	1.12	.629	>		√
Pengendalian Akuntansi (X_2)	2.1	.728	>		√
	2.2	.663	>		√
	2.3	.692	>		√
	2.4	.633	>		√
	2.5	.711	>		√
	2.6	.678	>		√
	2.7	.718	>		√
	2.8	.663	>		√
	2.9	.562	>		√
	2.10	.742	>		√
	2.11	.833	>		√
	2.12	.583	>		√
	2.13	.784	>		√
Sistem Pelaporan Kinerja (X_3)	3.1	.817	>		√
	3.2	.740	>		√
	3.3	.710	>		√
	3.4	.774	>		√
	3.5	.684	>		√
	3.6	.667	>		√
	3.7	.730	>		√
	3.8	.664	>		√
	3.9	.731	>		√
	3.10	.806	>		√
	3.11	.857	>		√
	3.12	.791	>		√
	3.13	.598	>		√
	3.14	.797	>		√
	3.15	.749	>		√

	3.16	.791	>		√
	3.17	.841	>		√
	3.18	.710	>		√
	3.19	.748	>		√
	3.20	.603	>		√
	3.21	.696	>		√
	3.22	.798	>		√
	3.23	.639	>		√
	3.24	.736	>		√
	3.25	.800	>		√
	3.26	.732	>		√
	3.27	.724	>		√
	3.28	.713	>		√
	3.29	.686	>		√
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	1	.726	>		√
	2	.520	>		√
	3	.689	>		√
	4	.669	>		√
	5	.783	>		√
	6	.629	>		√
	7	.618	>		√
	8	.721	>		√
	9	.739	>		√
	10	.623	>		√
	11	.677	>		√
	12	.699	>		√
	13	.655	>		√
	14	.647	>		√

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel 2 nilai R yang dihitung adalah lebih dari R tabel, yaitu sebesar 0,279 seperti pada tabel 2 sehingga dapat disimpulkan semua variabel dalam riset ini valid.

Uji Reliabilitas merupakan uji kualitas data guna mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab indikator berupa pertanyaan atau pernyataan dari sebuah kuesioner. Jika jawaban responden konsisten dari beberapa pernyataan, kuesioner bisa dianggap valid atau reliabel. Instrumen kuesioner dinyatakan reliabel apabila terdapat nilai Cronbach's > 0,70.

Tabel 3.Uji Reliabilitas

Variable	*Cronbach's Alpha if Item Deleted*	</>	Ketetapan	Reliabilitas
X_1	.922	>	.70	Reliabel
X_2	.922	>		
X_3	.922	>		
Y	.922	>		

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan table 3 nilai Cronbach lebih tinggi dari 70% atau 0,70. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, yang dirancang untuk setiap variabel, dapat diandalkan.

Uji Multikolinieritas termasuk uji asumsi klasik yang berfungsi untuk menilai adanya keterkaitan antara variabel bebas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.Uji Multikolinieritas

R	R^2	*Adjusted* R^2
0.844	0.713	0.694

Coefficient Correlations					
Model			X_3	X_2	X_1
1	*Correlations*	X_3	1.000	-0.524	-0.462
		X_2	-0.524	1.000	-0.428
		X_1	-0.462	-0.428	1.000
a. *Dependent Variable*: Y					

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel 4, model regresi tidak menunjukkan gejala multikolinearitas, dibuktikan dengan nilai R2 sebesar 84,4% jauh lebih tinggi dari 80%.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk membandingkan varians residu dari variabel bebas yang satu dengan lainnya.

Tabel 5.Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Taraf Signifikansi	Sig
X_1	.05	.771
X_2	.05	.973
X_3	.05	.700

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel 5 menyajikan temuan uji heteroskedastisitas metode Glejser; variabel KSA, PA, dan SP memberikan nilai signifikansi > 0,05. Hasil ini membuktikan tidak terbentuk heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6.Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]					
	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
Model	*B*	*Std. Error*	*Beta*	t	Sig.
(Constan)	9.527	5.562		1.713	.093
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	-.346	.240	-.277	-1.439	.157
Pengendalian Akuntansi (X_2)	.260	.225	.232	1.157	.253
Sistem Pelaporan (X_3)	.434	.102	.873	4.276	.000
a. *Dependent Variable*: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)					

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan perhitungan diatas, memperoleh persamaan :

Y = 9,527 - 0,346KSA + 0,260PA + 0,434SP

Berdasarkan tabel 6, nilai konstanta sebesar 9,527 menunjukkan apabila semua variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 9,527. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran (KSA) sebesar -0,346 mengindikasikan setiap kenaikan satu persen dalam kejelasan sasaran anggaran akan

mengakibatkan penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar -0,346, dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, pengendalian akuntansi (PA) sebesar 0,260 menggambarkan setiap kenaikan satu persen dalam pengendalian akuntansi akan menaikkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,260, jika variabel lain tidak berubah. Demikian pula, sistem pelaporan (SP) sebesar 0,434 menyimpulkan bahwa setiap kenaikan satu persen dalam sistem pelaporan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,434, dengan variabel lainnya pada kondisi yang sama.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) memberikan gambaran tentang seberapa baik model regresi linier sesuai dengan data yang diamati.

Tabel 7.Uji Koefisien Korelasi

R	R^2	*Adjusted* R^2
.844	.713	.694

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel 7, nilai adjusted R2 sebesar 0,694 atau 69,4 persen menunjukkan representasi variabel KSA, PA, dan SP terhadap AKIP sebesar 69,4 persen, sedangkan sisanya 30,6 persen dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji t dilakukan untuk mencari tahu terpengaruhnya dependent variable dari masing-masing independent variable (Ghozali, 2018).

Tabel 8.Uji t

	Sig.	
Konstan		-
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	.157	Tidak signifikan
Pengendalian Akuntansi (X_2)	.253	Tidak Signifikan
Sistem Pelaporan (X_3)	.000	Signifikan

Sumber: Data diolah, (2024)

Besaran signifikansi variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh 0,157 > 0,05, sehingga variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan, sesuai dengan temuan pada Tabel 8 Uji t. Dengan signifikansi senilai 0,253 < 0,05 untuk variabel Pengendalian Akuntansi, dampaknya tidak signifikan. Nilai signifikansi variabel sistem pelaporan yang didapatkan sebesar 0,000 < 0,05 maka dinilai mempunyai pengaruh cukup besar.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian membantah Hipotesis 1 (H_1), sehingga dapat disimpulkan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Riset ini sependapat dengan kajian sebelumnya oleh Arfianty, Fatimah (2023) bahwa kejelasan target anggaran tidak memberikan dampak signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran pada 14 satker Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat belum dirumuskan secara spesifik dan cermat. Selain itu, program yang telah ditetapkan belum dievaluasi secara rutin untuk menilai tantangan dan kesulitan dalam pencapaian sasaran sebagaimana tergambar pada tanggapan kuesioner.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil riset ini membantah Hipotesis 2 (H_2) yang mengungkapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak dipengaruhi oleh pengendalian akuntansi. Temuan ini menggambarkan akuntabilitas kinerja di 14 unit kerja di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalbar tidak

terpengaruh oleh audit internal maupun penetapan target anggaran. Hal ini menunjukkan betapa tidak efektifnya pengendalian akuntansi di satuan kerja tersebut dalam hal audit dan penetapan tujuan anggaran. Berdasarkan tanggapan kuesioner tergambar bahwa rencana jangka pendek dan jangka panjang pada 14 satuan kerja tersebut tidak digunakan secara optimal dalam pengambilan keputusan serta belum dilakukan evaluasi yang sistematis dan terjadwal. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkala membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal, memastikan akurasi laporan keuangan, mencegah kecurangan dan kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan evaluasi yang sistematis, organisasi dapat mengelola risiko lebih baik, memenuhi kewajiban hukum, dan mencapai tujuan keuangan dengan lebih efisien.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Temuan riset ini konsisten dengan Hipotesis 3 (H_3), yang menyatakan faktor-faktor dalam sistem pelaporan kinerja berdampak pada akuntabilitas lembaga pemerintah. Hal ini menguatkan bahwa pelaporan kinerja telah diselesaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku di 14 satuan kerja tersebut, sehingga organisasi tersebut siap mempertanggungjawabkan pelaporannya. Hal ini juga tergambar dari tanggapan kuesioner bahwa pada unit kerja tersebut terdapat perjanjian kinerja, target kinerja dan indikator kinerja yang menjadi acuan serta telah dilakukan pengukuran capaian kinerja dibawahnya secara berjenjang. Lebih lanjut, pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi aplikasi dan laporan kinerja telah disusun secara berkala dan berkualitas sesuai standar. Temuan penelitian memberikan kesimpulan bahwa sistem pelaporan yang efektif berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, artinya sistem pelaporan yang baik bisa menguatkan tingkat akuntabilitas kinerja—didukung dan konsisten oleh studi tentang Harianto D., Kennedy, Zarefar A. (2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan yakni akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan tujuan anggaran dan pengendalian akuntansi. Namun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan kinerja. Peneliti dihadapkan pada banyak keterbatasan sehubungan dengan riset yang dilakukan, seperti: (1) Riset ini hanya melibatkan 14 UPT di bawah Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat karena keterbatasan waktu, tenaga dan lainnya; Akibatnya, temuan tersebut hanya mewakili kondisi di 14 unit kerja dan tidak dapat diterapkan pada keadaan lain. (2) Variabel independen dari riset ini hanya terdiri dari 3 variabel. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel lain yang lebih mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Untuk mendapatkan hasil data yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan teknik lain, termasuk wawancara, pada penelitian selanjutnya. Penelitian yang akan datang bisa melibatkan variabel-variabel independen tambahan guna mengeksplorasi dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jumlah sampel bisa ditingkatkan oleh peneliti yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

Anastasia, D. R. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya, 10(1),

1–14.

Ananda, T. S. P., Maria, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Penyerapan Anggaran. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 68–74. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.57141/kompeten.v1i2.13

Ariyandani N.Chalid L.Umar N. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Tata Kelola (2020) 7(1) 19-27 Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.52103/tatakelola.v7i1.69

Ariyandani N.Chalid L.Umar N. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Tata Kelola (2020) 7(1) 19-27 Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.52103/tatakelola.v7i1.69

Azizah, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 1(1), 1–14.

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). (**Gambar 1. Paparan SAKIP LKJIP Kementerian Hukum dan HAM RI**). Tersedia:https://drive.google.com/file/d/1pjAiE8Aw0IdBt5bAvhFRIcc8w75FLgLy/view?usp=drivesdk. Diakses tanggal 17 September 2024.

Dewi Mantasari, Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. Decision : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 106–114. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.31850/decision.v4i1.2133

Evitania Precilia, N. P., & Sri Harta Mimba, N. P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kohesivitas Kelompok terhadap Senjangan Anggaran. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2381. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.24843/eja.2020.v30.i09.p16

Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang (p. 466). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herawaty, N. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Cakrawala Akuntansi, 6(2).

Hasanah A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Medan). Skripsi.

Harianto D., Kennedy, Zarefar A (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Aplikasi Akuntansi (2021) 6(1) 122-139 Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.29303/jaa.v6i1.111

Indonesia (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia (1999). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : Presiden RI.

Imelda, G., Syah, S., & Gustiningsih, A. (2021). Akuntansi Aset Tetap : Pentingkah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bagi Koperasi. Jurnal Akuntansi

Multiparadigma, 6. Tautan permanen ke dokumen ini: (http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/TB/issue/view/22), 104–119.

Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2), 231–246. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.25105/jat.v7i2.7446

Kharisma P, I., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(2), 126–135. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.22437/jaku.v6i2.14278

Kementerian Menpan-RB. Permasalahan dan Tindak Lanjut ke Depan. (Online) Tersedia :https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/permasalahan-dan-tindak-lanjut-ke-depan, diakses 17 September 2024.

Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 1(3), 1068–1079. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.24036/jea.v1i3.128

Muahamad Karyadi. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuanganan Aset Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI, 6(2), 76–85. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.54712/aliansi.v6i2.277

Murtin, A., & Rahmawati, S. I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Inovatif, 1(1), 17–28. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.59330/jai.v1i1.3

Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 4(1), 192–212. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.24036/jea.v4i1.463

Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429–444. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.24036/jea.v1i1.85

Priatna, H., & Nuraisyah, E. (2018). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintahan Desa se-Kecamatan Cisewu. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(11), 57–80.

Reza Viola, I., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. A. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 22(1), 92–102. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.29303/aksioma.v22i1.191

Sisaye, S. (1998). *Contingencies influencing the effectiveness of acquisition-based corporate growth and development strategies: The case of ITT*, 1920-1997. *Leadership & Organization Development Journal*, 19(5), 231–255. Tautan permanen ke dokumen ini:

DOI: 10.1108/01437739810234314

Suryani, S., Febrina, R., & Salmi, S. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 11(1), 13–22. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.32520/jak.v11i1.2072

Suryani, F., & Pujiono, P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 4(1), 167–181. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.31539/costing.v4i1.1516

Yulianti, Astri Furqani (2023). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Derah Kabupaten Sumenep Dengan Kepatuhan Regulasi sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Financial Issue* (JAFIS) (2023) 4(2) 58-68 Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.24929/jafis.v4i2.3283

Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Tirtayasa Ekonomika, 14(2), 204. Tautan permanen ke dokumen ini: DOI: 10.35448/jte.v14i2.6478